

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

- a. Secara bulanan, IHK Jawa Timur pada Oktober 2025 mengalami inflasi yang lebih tinggi dibandingkan bulan September 2025. Inflasi bulanan sebesar 0,30% (*mtm*) dan tahunan sebesar 2,69% (*yoy*). Inflasi bulanan ini dipicu kenaikan harga pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan komoditas utama penyumbang inflasi adalah emas perhiasan yang mengalami inflasi 11,96% dengan andil 0,23%; serta kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan komoditas telur ayam ras yang mengalami inflasi 6,91% dan andil 0,07%;
- b. Pada November 2025, Jawa Timur Kembali mengalami inflasi secara bulanan sebesar 0,17% (*mtm*), lebih rendah dibandingkan Oktober 2025 dengan inflasi tahunan sebesar 2,63% (*yoy*). Inflasi bulan November 2025 dipicu kenaikan harga pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, serta kelompok Transportasi. Inflasi kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau terjadi pada komoditas hortikultura seperti tomat (inflasi 40,57%; andil 0,05%); bawang merah (inflasi 9,88%; andil 0,04%); cabai merah (inflasi 10,23%; andil 0,02%); sawi hijau (inflasi 27,50%; andil 0,02%); wortel (inflasi 18,58%; andil 0,01%); dan kacang panjang (inflasi 15,25%; andil 0,01%). Namun demikian beberapa komoditas terpantau mendukung tertahannya inflasi lebih lanjut yaitu beras (deflasi 1,14%; andil -0,05%); daging ayam ras (deflasi 2,12%; andil -0,04%); dan telur ayam ras (deflasi 1,79%; andil -0,02%). Komoditas emas perhiasan pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya masih mengalami inflasi namun tidak setinggi bulan sebelumnya, inflasi bulanan tercatat 2,01% dengan kontribusi 0,04%. Sementara pada kelompok Transportasi, inflasi dipicu tarif angkutan udara seiring dengan kenaikan harga avtur pada Oktober 2025;
- c. Desember 2025, inflasi Jawa Timur sebesar 0,76% (*mtm*), lebih tinggi dibandingkan November 2025 dan kembali dipicu oleh kenaikan harga pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, serta kelompok Transportasi. Pada pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau komoditas yang memberikan andil antara lain cabai rawit (inflasi 100,03%; andil 0,24%); daging ayam ras (inflasi 4,56%; andil 0,08%); bawang merah (inflasi 8,17%; andil 0,04%); telur ayam ras (inflasi 3,30%; andil 0,03%); semangka (inflasi 15,46%; andil 0,02%); tomat (inflasi 8,51%; andil 0,01%); melon (inflasi 19,88%; andil 0,01%); ikan mujair (inflasi 5,53%; andil 0,01%); dan wortel (inflasi 12,99%; andil 0,01%). Komoditas emas perhiasan pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya kembali mengalami inflasi lebih tinggi dari bulan sebelumnya, inflasi bulanan tercatat 4,49% dan andil 0,10%. Kembali pada kelompok Transportasi, inflasi dipicu tarif angkutan udara sebesar 6,04% dan andil 0,08%;
- d. Inflasi Jawa Timur tahun 2025 terkendali dalam kisaran target yaitu sebesar 2,93% (*yoy*). Inflasi tertinggi terjadi di Sumenep (3,75%) dan terendah di Gresik (2,44%). Inflasi tahunan terutama bersumber dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 4,19%. Sementara kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan mengalami penurunan (-0,53%).
- e. Inflasi bulanan Jawa Timur Januari 2026 diperkirakan lebih landai dibandingkan Desember 2025 sejalan dengan: (i) Normalisasi mobilitas masyarakat pasca HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026; (ii) Penurunan harga pangan strategis seiring normalisasi permintaan didukung cuaca yang lebih kondusif.
- a.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan IV-2025, kelompok pengeluaran yang menyumbang inflasi tahunan (yoy) antara lain:

- Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami inflasi 4,19% (yoy) dengan andil 1,15%, lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya dengan catatan inflasi 3,81% (yoy) dengan andil 1,05%. Komoditas utama yang mendorong inflasi adalah beras (andil 0,21%); cabai rawit (andil 0,19%); daging ayam ras (andil 0,14%); sigaret kretek mesin (andil 0,06%); bawang merah (andil 0,06%); minyak goreng (andil 0,05%); cabai merah (andil 0,05%); santan jadi (andil 0,05%); telur ayam ras (andil 0,05%); kelapa (andil 0,04%); kopi bubuk (andil 0,03%); wortel (andil 0,03%); sigaret kretek tangan (andil 0,03%); daging sapi (andil 0,03%); ikan bandeng/ikan bolu (andil 0,02%); air kemasan (andil 0,02%); sigaret putih mesin (andil 0,02%); dan bayam (andil 0,02%). Kenaikan harga beras terjadi seiring penyesuaian harga acuan pembelian gabah di awal tahun sebagaimana Keputusan Kepala Bapanas No. 2/2025 tentang penetapan HPP baru untuk gabah dan beras guna mendukung kesejahteraan produsen yang direspon dengan Keputusan Kepala Bapanas No. 299 Tahun 2025 tentang penyesuaian acuan batas harga eceran beras guna mendukung stabilitas harga. Kenaikan daging ayam ras dan telur ayam ras seiring peningkatan harga jagung pipilan kering yang mengalami penyesuaian harga acuan sebagaimana Keputusan Bapanas No. 216 Tahun 2025 serta peningkatan permintaan di level nasional. Kenaikan harga komoditas hortikultura dipicu oleh gangguan produktivitas budidaya seiring fenomena musim kemarau basah dan curah hujan tinggi di Tengah permintaan yang meningkat. Sementara itu kenaikan harga sigaret terjadi seiring dengan penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 dan 97 Tahun 2024 mengenai penetapan Harga Jual Eceran (HJE) baru rokok sejak 1 Januari 2025.
- Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mengalami inflasi 15,26% (yoy) dengan andil 1,02%. Komoditas utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan (andil 0,92%). Harga emas dunia naik karena meningkatnya minat terhadap emas sebagai aset pelindung nilai dan *safe-haven*, yang dipicu oleh berlanjutnya ketidakpastian global, ekspektasi penurunan suku bunga oleh The Fed, serta peningkatan pembelian emas fisik oleh bank sentral. Ke depan, masih terdapat potensi kenaikan harga emas dunia yang akan mendorong inflasi pada komoditas emas perhiasan domestik;
- Kelompok transportasi mengalami inflasi 1,82% (yoy) dengan andil 0,23%, lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada periode sebelumnya yang tercatat sebesar 1,01% (yoy) dengan andil 0,13%. Komoditas utama inflasi pada kelompok ini adalah angkutan udara dengan andil inflasi 0,09%; mobil 0,07%; bensin 0,03%; dan sepeda motor 0,03%. Peningkatan tarif angkutan udara terjadi seiring peningkatan harga avtur dan peningkatan mobilitas masyarakat pada momen HBKN Nataru. Kendari demikian, kenaikan inflasi yang lebih tinggi pada kelompok ini mampu tertahan didukung oleh stimulus kebijakan Pemerintah melalui pemberian diskon tarif angkutan udara dengan skema: (i) PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP); (ii) Penurunan *fuel surcharge*; (iii) Pemotongan biaya layanan penumpang udara (PJP2U & PJP4U); (iv) Penurunan harga avtur pada 37 bandara; (v) Perpanjangan jam layanan bandara (*advance & extend operating hours*).

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Keterjangkauan Harga

- Optimalisasi Etalase Pengendalian Inflasi Kab/Kota (EPIK) di Jawa Timur berupa

warung/toko sebagai upaya penyediaan Operasi Pasar yang berkelanjutan. Terdapat 583 EPIK di 29 Kab/Kota dan 18 EPIK di Provinsi yang menjual bahan pokok strategis dengan harga HET atau lebih murah dari pasar;

- Operasi Pasar/Gerakan Pasar Murah sebanyak >2.200 titik dan penyelenggaraannya dilaksanakan sampai di pulau terluar seperti Pulau Bawean;
- Penyaluran Beras SPHP selama tahun 2025 mencapai 101,38 ribu ton (53,45% dari target alokasi Jan-Des sebesar 189,74 ribu ton) melalui: (1) Pasar Murah Pemda bersama Bulog Jatim; (2) koperasi instansi pemerintah; (3) Koperasi Desa/Kelurahan (KDKMP); (4) outlet BUMN; (5) outlet pangan binaan Pemda; (6) pengecer di pasar rakyat; (7) ritel modern; (8) Rumah Pangan Kita (RPK); dan (9) pengecer luar pasar.

2. Ketersediaan Pasokan

- Per 29 Desember 2025, total beras CBP dan Komersial Bulog Jatim mencapai 895,16 ribu ton (23% dari stok nasional), cukup untuk 15 bulan ke depan. Jawa Timur merupakan provinsi dengan penyerapan gabah paling besar, yakni 684,79 ribu ton (100,95% dari target) atau senilai Rp8,9 triliun;
- Penguatan kelembagaan melalui pendirian 35 Korporasi Petani (2 di Provinsi dan 33 di 21 Kab/Kota);
- Hasil produksi beras dari Korporasi Petani binaan Pemprov Jatim di Jombang dan Madiun diserap secara langsung dengan merk kolektif Jatim CETTAR dan didistribusikan dengan harga lebih murah dari pasar kepada ASN secara langsung (30-35 ton/bulan) dan kepada masyarakat melalui EPIK yang tersebar di Jawa Timur (15-20 ton/bulan) yang didukung surat penetapan toko EPIK oleh Pemprov sebagai payung hukum. Sinergi Bank Indonesia dengan TPID Jawa Timur melalui modernisasi alsintan bagi korporasi petani, dan dukungan media promosi beras Jatim CETTAR di seluruh EPIK di Jawa Timur;
- Optimalisasi PT. Jatim Grha Utama (PT. JGU) selaku BUMD Jatim sebagai *offtaker* pangan strategis (beras) dari Korporasi Petani Jombang (KMP Sarana Agro Lestari) yang mendistribusikan beras untuk ASN; serta dengan Korporasi Petani Madiun (KMP Jatim Makmur Sentosa) untuk kebutuhan pasokan beras dalam rangka mendukung operasional EPIK;
- Pemberian bantuan sarana prasana baik *on-farm* maupun *off-farm* untuk ketahanan pangan.

3. Kelancaran Distribusi

- Penyusunan 27 KAD baru dan pelaksanaan 20 KAD eksisting, antara lain PT. JGU sebagai *offtaker* korporasi petani untuk suplai beras bagi toko EPIK di 8 Kab/Kota dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan pemetaan pasokan intra Jatim;
- Optimalisasi dukungan fasilitasi logistik hibah truk dari KPwBI Prov. Jawa Timur untuk pendistribusian beras Jatim CETTAR ke sejumlah toko EPIK di Surabaya;
- Implementasi 82 program kelancaran mobilitas (subsidi angkutan barang/masyarakat) di 38 Kab/Kota se-Jawa Timur di berbagai hari besar keagamaan nasional (HBKN).

4. Komunikasi Efektif

- Perumusan kebijakan dan program peta jalan TPID Jawa Timur didasarkan pada kerangka kerja TPID yang disahkan melalui SE Gubernur dan didukung *dashboard monitoring* program TPID Jawa Timur;
- Pengesahan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Tahun 2025 - 2027 Provinsi Jawa Timur dan

14 Kab/Kota;

- Penyediaan *platform monitoring* harga se-Jawa Timur SISKAPERBAPO dengan akurasi dan korelasi tinggi terhadap data inflasi BPS didukung *platform monitoring* harga di 26 Kab/Kota;
- Pelaksanaan *High Level Meeting* (HLM) TPID Provinsi menjelang HBKN Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, serta HLM Kab/Kota.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan pengendalian inflasi yang dilaksanakan oleh TPID Provinsi Jawa Timur pada Triwulan IV-2025 telah berjalan baik dengan capaian sesuai target sasaran $2,5 \pm 1\%$ (yoy) yaitu sebesar 2,93 % (yoy). Capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian inflasi yang dilaksanakan oleh TPID Provinsi Timur bersama TPID Kab/Kota telah berjalan secara efektif dan terkoordinasi. Kebijakan yang antisipatif dan terstruktur serta konsistensi implementasi program pengendalian inflasi dalam menjaga stabilitas harga didukung koordinasi erat menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga inflasi. Selain itu, *High Level Meeting* (HLM) TPID yang diselenggarakan pada 25 November 2025 semakin memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi khususnya dalam menghadapi HBKN Nataru 2025/2026. Dengan kolaborasi lintas sektor melalui prinsip 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif), TPID Provinsi Jawa Timur berhasil menahan laju kenaikan inflasi.

- Keterjangkauan harga, TPID Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan berbagai program strategis yang mendukung stabilitas harga antara lain Gerakan Pasar Murah (GPM) dan Etalase Pengendalian Inflasi Kab/Kota (EPIK) yang tersebar di 29 Kab/Kota. Kegiatan tersebut menyediakan bahan pangan strategis seperti beras, minyak goreng, telur ayam ras, dan gula pasir dengan harga yang lebih terjangkau. Pelaksanaan OPM/GPM yang dilakukan bersama Perum Bulog, Disperindag, dan perangkat daerah lainnya mencapai >2.200 titik di seluruh Jawa Timur. Program ini terbukti efektif dalam menjaga keterjangkauan harga, terutama menjelang momen HBKN.
- Ketersediaan pasokan, kinerja Perum Bulog Kanwil Jawa Timur cukup baik dengan ketersediaan stok beras hingga akhir tahun 2025 mencukupi hingga 15 bulan ke depan. Selain itu, inovasi pengendalian inflasi berbasis ketahanan pangan daerah mulai menunjukkan hasil yang nyata. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Bank Indonesia dan BUMD telah berhasil mengimplementasikan program Korporasi Petani Jawa Timur. Melalui program ini, hasil produksi petani dari Kabupaten Jombang dan Madiun diserap dengan merek kolektif “Jatim CETTAR” dan didistribusikan oleh PT. Jatim Grha Utama (JGU) kepada ASN dan masyarakat melalui EPIK Jawa Timur. Program ini tidak hanya membantu menjaga stabilitas harga beras, tetapi juga memperkuat kemitraan antara petani, *offtaker*, dan Pemda.
- Kelancaran distribusi, TPID Provinsi Jawa Timur memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak untuk menjamin rantai pasok pangan yang efisien. Salah satunya melalui pelaksanaan Misi Dagang dan Investasi antarprovinsi yang turut mendukung kelancaran pasokan antarwilayah dan penguatan konektivitas perdagangan.
- Komunikasi efektif dan transparansi informasi harga, penguatan sistem informasi melalui SISKAPERBAPO, pemasangan *barcode* harga di pasar tradisional, serta pengembangan *Dashboard* TPID Provinsi Jawa Timur menjadi langkah konkret dalam mewujudkan keterbukaan data harga. *Dashboard* TPID Provinsi Jawa Timur digunakan sebagai alat *monitoring* kinerja TPID Kab/Kota. Kegiatan Rapat Koordinasi Mingguan dan *High Level Meeting* (HLM) juga rutin dilaksanakan untuk merespons dinamika

harga dan memperkuat sinergi antarinstansi. Hal ini sejalan dengan penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Jawa Timur Tahun 2025 - 2027.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Untuk mendukung terkendalinya inflasi Jawa Timur tahun 2026, sinergi dan koordinasi yang kolaboratif antara TPID Provinsi Jawa Timur, Bank Indonesia, TPIP serta *stakeholder* lainnya terus diintensifkan. TPID Provinsi Jawa Timur melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi yang terintegrasi dengan strategi 4K dalam Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2027 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/364-021/013/2025 tanggal 29 Oktober 2025. Sejalan dengan isu dan tantangan terkini guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengendalian inflasi, beberapa rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi yang digagas antara lain:

1. Penguatan Distribusi dan Infrastruktur Logistik Pangan Daerah

Diperlukan perluasan jaringan distribusi pangan strategis melalui kolaborasi antara PT. Jatim Grha Utama (JGU), PT Pos Indonesia (Agripas), dan toko EPIK di Kab/Kota. Penguatan infrastruktur distribusi ini penting untuk menjangkau wilayah dengan tingkat kerawanan logistik tinggi, termasuk daerah kepulauan dan perbatasan. Selain itu penguatan distribusi dilakukan melalui program Etalase Pengendalian Inflasi Kab/Kota (EPIK) *Mobile*.

2. Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani

Melibatkan korporasi petani untuk menjadi bagian dari rantai pasok regional melalui peningkatan kapasitas produksi, akses pembiayaan, serta penyediaan sarana prasarana penunjang. Skema pendampingan dan *business matching* juga penting dilakukan agar korporasi petani mampu menjadi mitra yang siap terlibat dalam perdagangan antar daerah maupun ekspor antar provinsi.

3. Digitalisasi dan Integrasi Data Pengendalian Inflasi Daerah

Seluruh Kab/Kota di Jawa Timur perlu mengintegrasikan sistem pemantauan harga ke dalam *Dashboard* TPID Provinsi agar data harga dan stok dapat dipantau secara *real-time*. Pengembangan Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) berbasis data SISKAPERBAPO dan BPS juga perlu dilakukan untuk deteksi fluktuasi harga lebih cepat dan akurat.

4. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi TPID Kab/Kota

Program *Capacity Building* TPID perlu diperluas dengan pelatihan analisis data harga, penggunaan *dashboard* digital, serta manajemen logistik pangan daerah. Pendampingan teknis oleh Bank Indonesia dan Pemprov Jawa Timur perlu diperkuat agar kebijakan pengendalian inflasi dapat diterapkan secara efektif di seluruh Kab/Kota.

5. Implementasi dan Pemantauan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2027

Pemerintah Provinsi bersama TPID Provinsi perlu memastikan bahwa setiap program memiliki indikator capaian yang jelas dan terukur. Evaluasi berkala setiap triwulan penting dilakukan untuk memastikan konsistensi pelaksanaan program dan menyesuaikan strategi sesuai

dinamika perekonomian dan harga pangan global.

Secara keseluruhan, kinerja TPID Provinsi Jawa Timur pada Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik dan terarah. Sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Perum Bulog, BUMD, serta pelaku usaha menjadi faktor utama yang menjaga inflasi tetap terkendali. Ke depan, dengan memperkuat distribusi, memperluas digitalisasi data, serta mereplikasi inovasi korporasi petani berbasis daerah, Jawa Timur terus berkomitmen melakukan pengendalian inflasi yang berkelanjutan..

Link dokumen dapat diunduh melalui link berikut
https://drive.google.com/drive/folders/1dJS11iGnLbe_jnAMuiSt-oJ2Q_QAm3Hc?usp=drive_link